

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, prinsip dasar demokrasi adalah hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri (Sulaeman 2015:12-24). Proses pengambilan keputusan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Karena partisipasi, pemerintah akan membuat keputusan yang adil untuk rakyatnya. Maka akan menumbuhkan kepercayaan publik pada pemerintahan yang baik. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah akan didorong oleh keputusan pemerintah yang mengikuti keputusan rakyat (Rahim 2004:1-2). Dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas proyek, dapat menjamin bahwa setiap kebijakan memenuhi tujuan dan tujuan komunitas. Strategi perencanaan menggabungkan dasar-dasar pemerintahan yang baik, termasuk pengambilan keputusan demokratis, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, mereka mencoba untuk menyesuaikan ide-ide ini dengan konteks regional (Lubis 2009:186-187).

Tetapi partisipasi masyarakat yang demokratis dalam tahapan evaluasi mengacu pada partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kinerja pemerintah atau kebijakan. Untuk memastikan pandangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam proses kebijakan yang dilaksanakan. Tahapan evaluasi yang dilakukan masyarakat terhadap proses pembangunan melibatkan penilaian terhadap dampak proyek terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana, mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk

memastikan bahwa proyek pembangunan memberikan manfaat positif kepada masyarakat, mengurangi dampak negatif, dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Desa Klapanunggal.

Melahirkan partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat yang dimana partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembagian dan pemanfaatan hasil pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya adalah salah satu contohnya. Distribusi ekonomi, sosial dan lingkungan dari proyek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai peran dalam menentukan bagaimana memanfaatkan manfaat tersebut secara adil dan berkelanjutan. Sehingga membantu mengurangi kesenjangan, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dan meningkatkan dampak positif pembangunan bagi semua masyarakat.

Pemerintahan Desa Klapanunggal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat dapat dicapai. Pemerintah melakukan dua fungsi pemerintahan yaitu kebijakan publik dan pelayanan publik. Mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman, dan sejahtera adalah tujuan kebijakan publik (Handoyo 2012:1-6). Dalam penyusunan sebuah program kebijakan perlu ada keterlibatan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan utama masyarakat. Tentunya ini dilakukan untuk mengkaji hal utama yang perlu di laksanakan dalam proses pembangunan, karna tentunya setiap program memiliki tujuan dan fungsinya sendiri.

Setiap melaksanakan implementasi program kebijakan, pemerintah Bersama-sama dengan masyarakat perlu membaca dan memahami proses instruksi program kebijakan yang dibuat secara berurutan untuk menghasilkan program pembangunan yang diinginkan. Setelah sampai pada tahap kebijakan program maka kemudian berlanjut pada tahap kebijakan proyek hal ini juga merupakan sesuatu hal yang paling penting yang menjadi bagian dari kebijakan publik. Dari kebijakan proyek

yang akan menjadi panduan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan secara konsisten, efisien, dan efektif (MR Akbar 2021:169-175).

Segala bentuk kebijakan yang telah diputuskan berdasarkan dengan partisipasi masyarakat melalui musyawarah maka pada tahap implementasi kebijakan yang telah diputuskan perlu dilakukan regulasi dengan tujuan agar kebijakan yang dikembangkan dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan mendasar yang diinginkan (Bams 2023:5). Pada tahap regulasi, setiap kebijakan disaring dan diolah. Selain itu, regulasi berfungsi untuk mereplikasi waktu secara efektif dan mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengembangan pelayanan publik. Tujuan utama regulasi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, meningkatkan keselamatan, memastikan kepatuhan terhadap standar tertentu, dan menciptakan lingkungan yang adil dan sehat bagi semua pemangku kepentingan.

Anggaran diperlukan tentunya untuk mendukung setiap proses pelaksanaan kebijakan. Sehingga pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada desa dengan mengoptimalkan bantuan anggaran yang telah diberikan melalui dana desa untuk mewujudkan setiap kebijakan program yang telah diputuskan dan untuk menuju kemandirian desa. Dalam mendapatkan anggaran tersebut, harus ada penyusunan anggaran, yang mencakup penjelasan rencana dan bagaimana dana pemerintah akan dialokasikan untuk mencapai kegiatan yang telah disepakati. Maka perlu ada tindakan nyata, dimulai dengan menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Tujuan ini harus jelas, terukur, realistis dan relevan. Anggaran yang dialokasikan kepada desa-desa dapat digunakan di berbagai proyek pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa-desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Meningkatkan SDM pemerintahan sangat penting. Karena kualitas pemerintah desa yang buruk menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang cara dana desa digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam situasi lain, masyarakat harus ikut serta untuk memantau penggunaan dana desa; masyarakat tidak boleh apatis dan harus kritis terhadap pengelolaan

anggaran. Karena semua orang bertanggung jawab atas kepemimpinan, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk pengelolaan anggaran yang baik. Berbagai kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Cara-cara ini termasuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, mengadakan pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan keterampilan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Memanfaatkan teknologi sebagai inovasi untuk menciptakan ruang untuk partisipasi masyarakat desa dan alternatif (Mujib 2023).

Penting untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pengawasan dan pengendaliannya. Ditunjukkan juga bahwa pengawasan dan pengendalian mendeteksi pelanggaran sejak usia muda, sehingga anggaran dapat dikelola dengan lebih bertanggung jawab. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat melalui model swakelola memungkinkan perencanaan dan eksekusi independen dari jenis inisiatif ini di dalam desa, mencegah dana meninggalkan komunitas untuk mendanai pembangunan (Santoso 2023).

Contohnya saja, untuk mengembangkan potensi desa dari segi pembangunan, dapat lebih efisien dan efektif, mereka juga akan bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan desanya dengan lebih baik. Sedangkan jika masyarakat bersikap apatis dalam mengelola anggaran maka program kebijakan yang dikerjakan tidak efektif, peluang untuk menyalahgunakan anggaran bisa saja terjadi karna kurangnya kontrol dari masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta apa saja yang menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakatnya pada tahapan pelaksanaan dana desa semua hal ini akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sumber modal penting bagi pembangunan suatu desa adalah partisipasi masyarakatnya. Membantu memajukan pembangunan melalui pelaksanaan pengelolaan dana desa serta menentukan seberapa efektif dan efisien program kebijakan yang telah dibuat. Pengelolaan dana desa yang transparansi dan partisipatif merupakan pilar yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi program kebijakan. Pentingnya partisipatif sesuai kebutuhan utama warga desa. Namun pada salah satu proses membiayai program kebijakan yang telah disusun di desa klanunggal masih belum memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desanya secara menyeluruh.

Kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi alasan utama mengapa kebutuhan pokok masyarakat tidak bisa terimplementasikan secara efektif dan efisien. Sampai tahap pelaksanaan dana desa di Desa Klanunggal, pemerintah desa sebagai koordinator pengelolaan anggaran belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa sebagai pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan. Selain itu minimnya ketidaktahuan masyarakat desa tentang peran serta mereka untuk ikut terlibat dalam proses pengelolaan dana desa menjadi dampak buruk bagi perkembangan desa. Hal ini disebabkan karena tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga kebutuhan masyarakat tidak terimplementasikan dengan baik. Minimnya informasi yang didapatkan masyarakat dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa menjadi salah satu alasan pelengkap kenapa kebutuhan prioritas masyarakat Desa Klanunggal semakin tidak terpenuhi.

Sumber utama masalah saat ini di desa klanunggal adalah cara pengelolaan dana desa. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif kebijakan yang dianggap sangat tidak efisien; bukti statistik, seperti peningkatan ekonomi rumah tangga, tidak dapat mendukung klaim ini. dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk pembangunan; pemerintah tidak memberikan perhatian khusus kepada kelompok petani. Pada akhirnya, realitas ini menyajikan

gambaran yang terdistorsi tentang administrasi desa sebagai perencana pembangunan dan tata kelola lokal.

Kekhawatiran bahwa administrasi uang desa tidak dialokasikan dengan tepat misalnya, tuntutan masyarakat tidak sejalan dengan jenis proyek konstruksi yang sedang dilakukan. Sebagai hasilnya, ini menyoroti pentingnya keterlibatan publik, yang merupakan komponen mendasar dari filosofi demokratis bersama kesetaraan hak suara dan partisipasi dewasa dalam proses pembuatan kebijakan dan pemilihan. Ini konsisten dengan gagasan tata kelola, yang memungkinkan masyarakat yang berada di luar pemerintahan untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik. Pemerintah dapat menggunakan anggaran sebagai sarana kebijakan untuk terlibat dalam berbagai area kehidupan masyarakat. Dengan demikian, anggaran dapat memiliki dampak baik dan buruk pada semua dimensi kehidupan masyarakat.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program kebijakan memiliki dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri seperti kurangnya representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga program pembangunan tidak semuanya memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat juga menghambat pembangunan desa yang berkelanjutan karena keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan manfaatnya secara khusus bagi masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis menyusun pertanyaan penelitian yang dapat membantu peneliti fokus pada aspek tertentu. Adapun Yang Menjadi Pertanyaan Penelitiannya Sebagai Berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal tahun 2022?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Akademik

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan akademik dari penelitian ini dilaksanakan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2022

1.4.2. Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S. Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1. Signifikansi Akademik

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki signifikansi akademik yang penting karena melibatkan banyak aspek dalam studi pembangunan, pemerintahan, dan partisipasi sosial. Sehingga hal ini dapat memberikan pengembangan dan keterkaitan dengan ilmu politik khususnya studi tentang Perubahan Sosial dan Pembangunan Pedesaan.

Dimana dijelaskan pada Perubahan Sosial dan Pembangunan Pedesaan merujuk pada transformasi dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah pedesaan. Hal ini bisa melibatkan pola gaya modern, pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sumber daya dan infrastruktur, serta perubahan dalam sistem sosial dan nilai-nilai masyarakat pedesaan. dalam konteks ini, pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

2. Penelitian ini dapat memberikan referensi ilmiah terhadap peneliti yang memiliki minat untuk meneliti judul serupa tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

1.5.2. Signifikansi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan agar sekiranya dijadikan sebagai panduan evaluasi bagi masyarakat desa lainya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bacaan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka skripsi ini penulis melakukan perbandingan penelitian dengan peneliti terdahulu antara lain, persamaan dan perbedaannya. Dengan tujuan agar penulis terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan objek dan subjek penelitian yang sama serta kemungkinan adanya plagiarisme.

Tabel 1.1 Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Tujuan Penelitian
1	Riau Simamora, Skripsi (2021)	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemamfaatan alokasi dana desa.
2	Fiky Riski, Skripsi (2019)	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018	Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan para peneliti sebelumnya maka penulis menemukan perbedaan dan persamaan dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Riau Simamora: “Partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa di desa Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan”. yang menjadi

perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu dari lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan untuk persamaanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa. Selain itu peneliti juga menggunakan teori yang sama yaitu teori partisipasi masyarakat dari Cohen & Uphoff (1977).

2. Fiky Riski: “Partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa untuk meningkatkan perekonomian desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.” yang menjadi perbedaan yaitu lokasi penelitian yang berbeda, masalah yang diteliti karna peneliti sebelumnya hanya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Sedangkan untuk persamaanya menggunakan metode penelitian yang sama dan memiliki tujuan penelitian yang sama dalam melihat tingkat partisipasi masyarakat di dalam anggaran dana desa.

1.7 Landasan Konseptual

1.7.1 Teori Partisipasi

Partisipasi adalah suatu tindakan atau proses di mana individu atau kelompok berpartisipasi dalam suatu kegiatan, keputusan, atau kegiatan tertentu. Hal ini mencakup berbagai tingkat partisipasi, mulai dari partisipasi aktif hingga partisipasi sederhana. Partisipasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti politik, sosial, ekonomi atau budaya, dan merupakan cara penting untuk membuat suara seseorang didengar, berkontribusi atau mempengaruhi perubahan dalam berbagai aspek masyarakat (Kusmanto 2014: 78-90).

Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), Ini terutama berkaitan dengan menentukan alternatif sehubungan dengan konsep atau konsep

yang memiliki minat bersama dengan masyarakat. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini melibatkan, antara lain, menawarkan ide-ide dan konsep dari minat bersama, menghadiri pertemuan dan diskusi, dan menanggapi atau menolak program yang diusulkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*) meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefits*). Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan selanjutnya (R. S. Kurnia 2017:24-25).

1.7.1.1 Tingkatan Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai sebuah

tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan (Riadi 2020).

Menurut (Arnstein 1969:216-224), terdapat delapan tingkatan dalam partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Manipulasi (*Manipulation*) merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah. Pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.
2. Terapi (*Therapy*) merupakan tangga kedua. Pada tingkatan ini, Pemerintah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk mengubah cara masyarakat berpikir. Masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerless*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
3. Pemberian Informasi (*Informing*) merupakan tangga ketiga. Pada tingkatan ini warga negara dapat memang mendengar dan didengar. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa pandangan mereka akan diperhatikan oleh pemerintah.

4. Konsultasi (*Consultation*) merupakan tangga keempat. Pada tingkatan ini pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Tingkat ini merupakan tingkat yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak dijadikannya ide-ide dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Bentuk konsultasi masyarakat adalah survei tentang pola pikir masyarakat, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat publik. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu.
5. Perujukan (*Placation*) merupakan tangga kelima. Pada tingkatan ini masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah, dengan kata lain, pemerintah membiarkan masyarakat untuk memberikan saran atau usul, tetapi keputusan masih dipegang oleh elit kekuasaan. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat pada anggota komite masih terlalu sedikit dibandingkan dengan anggota instansi pemerintah.
6. Kemitraan (*Partnership*) merupakan tangga keenam. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemecahan berbagai permasalahan. Setelah ada kesepakatan tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.
7. Tingkat ketujuh adalah Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Power*). Pada tingkat ini, masyarakat diberi wewenang untuk memilih strategi atau proyek pembangunan yang akan menguntungkan mereka. Untuk menyelesaikan masalah saat ini, pemerintah harus melakukan perundingan daripada menekan masyarakat.

8. Pada tangga kedelapan, pengawasan masyarakat (*Citizen Control*) adalah tingkat partisipasi tertinggi. Pada tingkat ini, masyarakat memiliki otoritas penuh untuk mengevaluasi program atau institusi yang relevan dengan kepentingan mereka.

Jelas, delapan anak tangga adalah penyederhanaan, tetapi membantu mengilustrasikan poin yang dimiliki begitu banyak orang terjawab - bahwa ada gradasi yang signifikan dari partisipasi warga. Mengetahui gradasi ini membuatnya mungkin untuk memotong hiperbola untuk memahami tuntutan partisipasi yang semakin keras dari yang miskin serta keseluruhan tanggapan yang membingungkan dari para pemegang kekuasaan (Arnstein 1969:216-224).

1.7.2 Konsep Desa

Desa, menurut R. Bintarto, adalah perwujudan geografis yang dihasilkan oleh elemen fisiografis, sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, desa, desa adat, atau desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soleh 2017:35-36).

Keuangan desa adalah salah satu hal yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut, keuangan desa terdiri dari semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta semua barang dan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban ini mencakup semua hal yang menyebabkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut UU No. 6/2014, desa memiliki beberapa sumber

pendapatan, yaitu: 1) pendapatan asli desa; 2) bagian dari pajak dan retribusi daerah dan Kabupaten/Kota; 3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah; 4) alokasi anggaran dari APBN; 5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 6) hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga.

Jadi dana desa sendiri bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Klapanunggal memperoleh dana desa dari APBN tahun 2022 sebesar Rp. 1.190.804.000 yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD).

1.7.2.1 Desa Secara Politik

Pengertian desa secara politik merujuk pada aspek atau dimensi politik dari suatu desa. Secara umum, desa adalah unit pemerintahan terkecil di wilayah pedesaan dan memiliki otonomi dalam mengelola urusan-urusan lokalnya. Dalam konteks politik, desa adalah entitas politik yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang berbeda dari sistem pemerintahan tingkat provinsi atau nasional. Desa merupakan unit pemerintahan tingkat lokal yang berada di bawah wilayah administratif kabupaten atau distrik. Sebagai unit pemerintahan lokal, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan yang bersifat lokal, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pembangunan wilayah. Posisi kepala desa adalah salah satu aspek politik penting di desa. Kepala desa biasanya dipilih melalui mekanisme pemilihan atau penunjukan tertentu, tergantung pada sistem politik negara. Kepala desa memiliki peran penting dalam mengambil keputusan politik dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di desa.

Struktur pemerintahan desa pada sistem politik dan hukum memiliki badan-badan pemerintahan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pengertian desa secara politik juga mencakup aspek partisipasi politik masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif penduduk desa dalam proses pemilihan umum, musyawarah desa, dan mekanisme partisipasi lainnya untuk menentukan arah kebijakan dan program pemerintahan desa. Dalam konteks politik, desa juga terlibat dalam hubungan dengan pemerintah tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan dukungan, sumber daya, dan bantuan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya (Barniat 2018:25-40).

1.7.2.2 Desa Secara Sosiologis

Masyarakat desa dikenal ramah, penuh perhatian, bertetangga dengan baik, dan pandai mempertahankan norma sosial seperti hidup gotong royong dan jiwa saling membantu orang lain. Digunakan untuk mempelajari sifat dan karakter ramah nenek moyang Indonesia dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Selain itu, mengevaluasi kembali keyakinan nasional Indonesia yang diwakili oleh masyarakat desa merupakan awal dari pembangunan karakter anak bangsa. Desa terbentuk karena insting manusia yang secara naluriah ingin hidup bersama pasangan, anak, dan sanak saudara, yang biasanya memilih untuk tinggal bersama. Tempat tinggal dapat berupa area yang dapat bergerak, terutama di hutan atau lahan yang masih memungkinkan keluarga untuk berpindah (Jamaludin 2015:7).

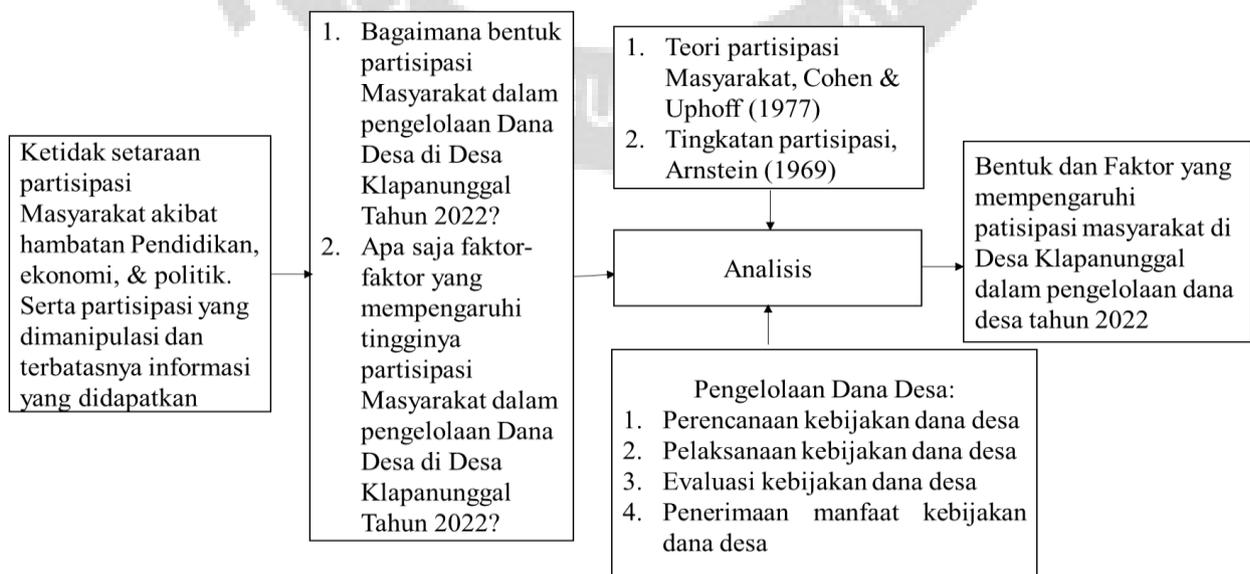
1.7.2.3 Desa Berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014

Latar belakang filosofis dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur kepentingan masyarakat lokal dan memainkan peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Dengan keluarnya UU No. 6/2014, Indonesia mengakui dan menjamin keberlangsungan desa (Sajangbati 2015:25-26).

1.8 Bagan Alur Pemikiran

Alur pemikiran merupakan urutan aliran konsep, ide atau informasi dalam suatu pemikiran atau tulisan. Alur berpikir ini melatih cara berpikir atau berargumen dengan menyusun gagasan-gagasan secara logis dan terstruktur agar membentuk rangkaian yang koheren dan dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagan alur berpikir menggambarkan alur pemikiran peneliti serta asumsi dasar penelitian, yang merupakan asumsi awal dari penelitian ini. Secara umum, kerangka berpikir adalah jalan dari masalah yang ingin dibahas dalam karya ilmiah, mulai dari awal hingga akhir.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Alur Pemikiran



Pada bagan kerangka alur pemikiran diatas adapun yang menjadi sumber permasalahannya yaitu ketidak setaraan partisipasi masyarakat akibat hambatan pendidikan, ekonomi, dan politik. Serta partisipasi yang dimanipulasi dengan terbatasnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat Desa Klapanunggal dalam pengelolaan dana desa tahun 2022. Sehingga beranjak dari permasalahan ini melahirkan pertanyaan penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal Tahun 2022?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal Tahun 2022?

Dalam mengevaluasi uraian partisipasi masyarakat di atas, peneliti menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1977), dan teori tingkatan partisipasi menurut Arnstein (1969). Teori ini digunakan sebagai pedoman untuk membantu peneliti melihat dan mendeskripsikan bagaimana cara melibatkan masyarakat desa Klapanunggal dalam proses partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta ikut dalam mengelola, memantau, mengevaluasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat selama pelaksanaan program kebijakan dilaksanakan. Sehingga melahirkan tujuan akhir dari penelitian yaitu bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Klapanunggal.

Sumber modal yang mendasar bagi pembangunan adalah keterlibatan masyarakat hal ini sangat penting untuk membantu memajukan pembangunan melalui rencana keuangan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama untuk menentukan efektivitas dan efisiensinya suatu program. Kurang terwakilinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan program pembangunan tidak memenuhi seluruh prioritas dan kebutuhan masyarakat akibat kurangnya partisipasi masyarakat, juga menghambat

pembangunan berkelanjutan di desa, karena keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi serta manfaat secara nyata bagi masyarakat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian Kualitatif

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fakta, realita, masalah, gejala, dan peristiwa. Hal ini hanya dapat dicapai jika peneliti mempelajarinya secara menyeluruh dan tidak terbatas pada pemahaman permukaan. Selain menjadi ciri khas pendekatan kualitatif, kedalaman ini juga merupakan keunggulannya (Semiawan, 2015:2). Penelitian kualitatif menjawab masalah penelitian dengan data berupa narasi yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan pengalihan dokumen (Wahidmurni 2017:4). Menurut W.I Thomas bahwa jika seseorang mendefinisikan suatu situasi sebagai nyata, terlepas dari akurasi definisi tersebut, maka situasi tersebut nyata dalam konsekuensinya.

Memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk menyelidiki bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal tahun 2022. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan dan menampilkan situasi temuan di lapangan.

1.9.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara komprehensif tentang suatu permasalahan/peristiwa tertentu. Menurut Mudjia Rahardjo, (2017:5) menyimpulkan bahwa studi kasus adalah serangkaian tindakan ilmiah yang mempelajari suatu peristiwa, program, atau aktivitas secara menyeluruh,

mendalam, dan mendalam, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa tersebut. Fokus studi kasus biasanya adalah hal-hal yang nyata (nyata) dan unik, bukan sesuatu yang berlalu atau hilang (Hidayat 2019:3).

Sehingga kaitan jenis penelitian studi kasus dengan tujuan penelitian penulis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait dengan partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal dalam pengelolaan anggaran. Secara sosial jenis penelitian studi kasus juga memiliki keterkaitan bagi penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakatnya serta faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal dalam pengelolaan dana desa.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa data adalah hasil dari pencatatan peneliti yang terdiri dari fakta dan angka, yang dapat digunakan untuk membuat informasi. Sementara itu, informasi adalah hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk tujuan tertentu (Rahmadi 2011:70-71). Pengumpulan data adalah tahap penelitian yang sangat penting karena dilakukan untuk mendapatkan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian (Rahardjo 2011:1). Selain itu pengertian dari data itu sendiri adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat diukur atau dihitung, yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk angka, teks, atau bentuk lainnya.

Jenis data sendiri terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang berbeda yang sering digunakan dalam penelitian dan analisis data:

1. Defenisi data primer merujuk kepada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Jadi untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti menggunakan metode observasi dalam pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, kejadian, atau fenomena tanpa mengubah atau memanipulasi kondisinya. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui data terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, data tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program kebijakan, data terkait partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pada setiap program kebijakan, dan data tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dari setiap program kebijakan yang sudah terlaksana.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada kepala desa, aparat desa, kepala dusun, dan masyarakat Desa Klapanunggal yang terlibat dalam proses partisipasi untuk mendapatkan data yang diinginkan tentang partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2022 mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan manfaat dari program kebijakan.

a. Wawancara merupakan teknik penulis untuk mengumpulkan data primer. Pada proses pengumpulan data penulis menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang diinginkan, sebelumnya penulis telah Menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan dan interaksi berlangsung sesuai dengan urutan pertanyaan yang telah disusun. Pendekatan ini digunakan untuk memungkinkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Data primer yang ingin digali kepada sumber informan adalah terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal tahun 2022.

2. Defenisi Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh orang lain selain peneliti atau individu yang saat ini menggunakan data tersebut disebut data sekunder. Contoh sumber sekunder termasuk literatur, laporan penelitian, atau basis data yang sudah ada. Selain itu data sekunder juga diartikan sebagai data kedua yang dijadikan data pendukung dalam penelitian yang dimana data sekunder merupakan sumber data yang dicatat oleh pihak lain (Umar 2013:30). Sebagai data pendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga membutuhkan data rincian Dana Desa Klapanunggal Tahun 2022, Geografis Desa Klapanunggal, data tentang jumlah penduduk desa, data tentang rencana kerja kegiatan penggunaan dana desa, UU Dana Desa, data terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan arah implementasi anggaran Dana Desa Klapanunggal tahun 2022.

1.9.4 Informan

Peneliti menentukan informan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pemilihan informan harus dilakukan dengan cermat karena informan akan mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Menurut (Bungin 2011:106) mengatakan bahwa informan penelitian dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel kualitatif, yaitu *purposive sampling*. Artinya, subjek penelitian relatif kecil dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi subjek penelitian masih dapat diperluas sesuai kebutuhan.

Adapun variabel yang ditentukan oleh penulis sebagai subjek penelitian yaitu mereka yang terlibat pada pengelolaan dana desa, berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan terkait program kebijakan, terlibat secara nyata dalam pelaksanaan kebijakan, berkontribusi dalam memberikan pengawasan selama proses penggunaan anggaran, mengetahui dan memahami pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal tahun 2022. Dalam mendapatkan data dan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, berdasarkan penjelasan uraian diatas maka adapun yang menjadi sumber informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Klapanunggal, alasan peneliti memilih narasumber sebagai sumber informan karna narasumber memiliki pengetahuan yang luas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa.
2. Perangkat Desa Klapanunggal Bagian Kaur Perencanaan, alasan peneliti menjadikannya sebagai sumber informan karna narasumber memiliki beragam tugas dan tanggung jawab di dalam desa dan memiliki pengetahuan yang luas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
3. Kepala dusun I, II, III, dan IV. Desa Klapanunggal sendiri terdiri dari empat dusun, dari empat dusun ini semuanya menjadi sumber informasi. Selain itu alasan peneliti memilih kepala dusun sebagai sumber informan karena kepala dusun merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di tingkat desa atau lingkungan yang berfokus pada pelayanan dan koordinasi di tingkat masyarakat.
4. Peneliti memilih masyarakat Desa Klapanunggal sebagai sumber informasi karena merekalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, mereka harus tahu tentang kontribusi dan pengaruh mereka dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut. Mereka juga harus dapat merasakan kontribusi yang telah mereka berikan dalam pengelolaan dana desa tersebut serta manfaat apa pun yang mungkin mereka terima atau berdampak pada mereka.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Landasan
1	Ade Endang Saripudin	Kepala Desa Klapanunggal	Representasi Pemerintahan Desa
2	Ade Saputra	Kaur Perencanaan Desa Klapanunggal	Representasi Pemerintahan Desa
3	Sakri	Kepala Dusun I	Representasi Wilayah
4	Adang	Kepala Dusun II	Representasi Wilayah
5	Ukar	Kepala Dusun III	Representasi Wilayah
6	Fendi	Kepala Dusun IV	Representasi Wilayah
7	Hendra	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel usia
8	Pubi Santoso	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel usia
9	Asep Sutiawan	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel profesi
10	Supriyanto	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel profesi
11	Mintra	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel tingkat kesejahteraan masyarakat
12	Endang Soma	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel tingkat kesejahteraan masyarakat
13	Dendy Ristiawan	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel pendidikan
14	Yayah Komariyah	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat, berdasarkan variabel pendidikan
15	Hasan Nasir	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat miskin
16	Nurianah	Masyarakat Desa Klapanunggal	Representasi Masyarakat miskin

1.9.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini merupakan pedoman penulis untuk mendapatkan data melalui wawancara yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Peneliti menggunakan alat penelitian ini untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data, Suharsimi Arikunto (2006:160), agar prosesnya menjadi lebih mudah dan hasilnya menjadi lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah (Data 2014:12).

Tabel 1.3 Operasionalisasi Teoritis Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator	Item
Teori Partisipasi Masyarakat	Bentuk Partisipasi	Pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa sering masyarakat diundang untuk menghadiri rapat untuk membahas alokasi anggaran Dana Desa? 2. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi pengelolaan anggaran dalam Dana Desa? 3. Siapa yang memimpin musyawarah? 4. Apakah masyarakat merasa pendapat mereka dihargai saat mengambil keputusan tentang pengelolaan anggaran Dana Desa? 5. Berapa banyak masyarakat yang hadir dalam kegiatan musyawarah? 6. Apa saja aspirasi masyarakat dalam musyawarah? 7. Sejauh mana masyarakat merasa penjelasan tentang alokasi anggaran dana desa disampaikan dengan jelas kepada masyarakat?
		Partisipasi Dalam Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernahkah masyarakat terlibat langsung dalam proyek atau kegiatan yang didanai oleh dana desa? 2. Seberapa sering masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa? 3. Apa saja program dalam Dana Desa? 4. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan? 5. Dalam program pemberdayaan perempuan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat? 6. Bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan? 7. Apakah ada rencana atau prosedur yang dapat membantu orang-orang di Desa Klapanunggal lebih terlibat dalam pelaksanaan proyek?

		Partisipasi Dalam Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan dilakukan evaluasi? 2. Sejauh mana masyarakat merasa bahwa evaluasi terhadap proyek-proyek dari Dana Desa melibatkan pandangan mereka? 3. Bagaimana bentuk pengawasan dalam setiap program? 4. Apa yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan? 5. Sarana apa yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan? 6. Apa yang menjadi bukti evaluasi? 7. Tingkat kepuasan masyarakat dengan layanan yang dibiayai melalui dana desa seperti apa? 8. Apakah masyarakat memiliki akses ke informasi terkait pengelolaan dana desa?
		Partisipasi Dalam Penerimaan Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas yang ditawarkan kepada orang-orang untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan dana desa? 2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap alokasi anggaran dana desa dan dampaknya pada penerimaan manfaat? 3. Dalam program pembangunan jalan siapa penerima manfaatnya? 4. Berapa banyak orang yang menerima manfaat? 5. Apa yang menjadi bentuk manfaatnya? 6. Bagaimana masyarakat menjaga setiap hasil pembangunan desa? 7. Apakah ada kompensasi atau insentif khusus yang diberikan kepada anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa?

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis yang dikumpulkan melalui catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Data disusun dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Secara singkat, analisis data digunakan untuk membuat data lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Memahami analisis,

memberikan penjelasan tentang pola uraian, dan menemukan hubungan antara dimensi uraian adalah semua komponen interpretasi data di sini (Rahmadi 2011:92).

Adapun yang menjadi Langkah-langkah analisisnya, yaitu:

- a. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi tepat dari lapangan, kemudian mengatur dan menyusunnya sesuai urutan untuk digunakan dalam penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyusun rencana penelitian, yang mencakup tujuan, metodologi, dan alat pengumpulan data. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman tentang konteks dan kerangka kerja dari partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa, peneliti meninjau literatur tentang topik ini dan memilih metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara terstruktur dan observasi.
- b. Reduksi data adalah pemilihan yang berfokus terhadap topik penting untuk kebutuhan penelitian. untuk memudahkan analisis dan interpretasi hasil dengan menemukan pola atau hasil yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. untuk menghindari kelebihan informasi, yang membuat analisis data yang menyeluruh menjadi sulit.
- c. Data disajikan sehingga orang lain dapat memahami temuan data dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Studi ini membandingkan cara masyarakat Desa Klapanunggal bertanggung jawab atas dana desa.
- d. Supaya menghasilkan penelitian yang kredibel, verifikasi data berarti membuat kesimpulan dengan bukti data yang kuat, dalam mengurangi kemungkinan kesalahan peneliti mengumpulkan informasi dari arsip desa klapanunggal untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan. Masyarakat diwawancara untuk mengetahui seberapa terlibat dalam proses pembangunan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat desa itu sendiri.

1.10 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik atau Konseptual, Bagan Alur Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Objek Penelitian

Bab ini akan membahas tentang, gambaran objek penelitian dapat berupa kegiatan atau fenomena tertentu yang menjadi fokus penelitian. Bagian selanjutnya akan membahas tentang kondisi geografis Desa Klapanunggal, jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, agama, ekonomi, dan dilanjutkan dengan pembahasan gambaran umum implementasi kebijakan keuangan Desa Klapanunggal, serta anggaran Dana Desa Klapanunggal Tahun 2022 yang disertakan dengan penjelasan penggunaan anggaran dana desa pada implementasi kebijakan.

Bab III : Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Klapanunggal Dalam Pengelolaan Dana Desa

Bab ini berisikan tentang bentuk partisipasi masyarakat. Mulai dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam evaluasi, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan tingkat partisipasi itu sendiri. Selain itu bab ini juga membahas tentang Program Kebijakan Dana Desa di Desa Klapanunggal, Program Pembangunan Jalan, Alokasi Dana BLT Desa, Partisipasi Masyarakat Pada Program Kebijakan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan,

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana BLT, Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Klapanunggal,

Bab IV : Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pada bab ini akan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal dalam pengelolaan dana desa, baik dari segi faktor pendukung dan dari segi penghambat partisipasi. Serta melihat bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Klapanunggal dalam program kebijakan yang di implementasikan di dalam desa, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana BLT,

Bab V : Penutup

Kesimpulan:

Setelah berbicara anggaran tahun 2022, satu hal yang jelas adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan. Melibatkan warga secara aktif dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Saran:

Dalam melihat fenomena partisipasi masyarakat di Desa Klapanunggal yang masih tergolong rendah karena berbagai faktor permasalahannya, adapun saran yang bisa ditawarkan agar sekiranya menjadi panduan pemerintah dan masyarakat untuk kembali terlibat secara aktif dalam pengelolaan anggaran dana desa.

- a. Berangkat dari pemerintahnya sendiri agar sekiranya untuk bisa kembali secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat, merangkul masyarakat dari golongan apapun karena dari hal ini tentunya akan melahirkan rasa kepedulian dan tanggung jawab dari masyarakat desa itu sendiri.
- b. Masyarakat juga tidak boleh apatis, masyarakat harus bisa mengambil bagian untuk turut terlibat dalam setiap proses program kebijakan yang diputuskan karena hal ini menyangkut tentang kehidupan masyarakat desa itu sendiri.